

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perkembangannya perubahan tidak hanya pada pengelolaan keuangan daerah tetapi juga pada pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan di tetapkannya 4 (empat) paket Undang-Undang : (Nazier, 2006)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

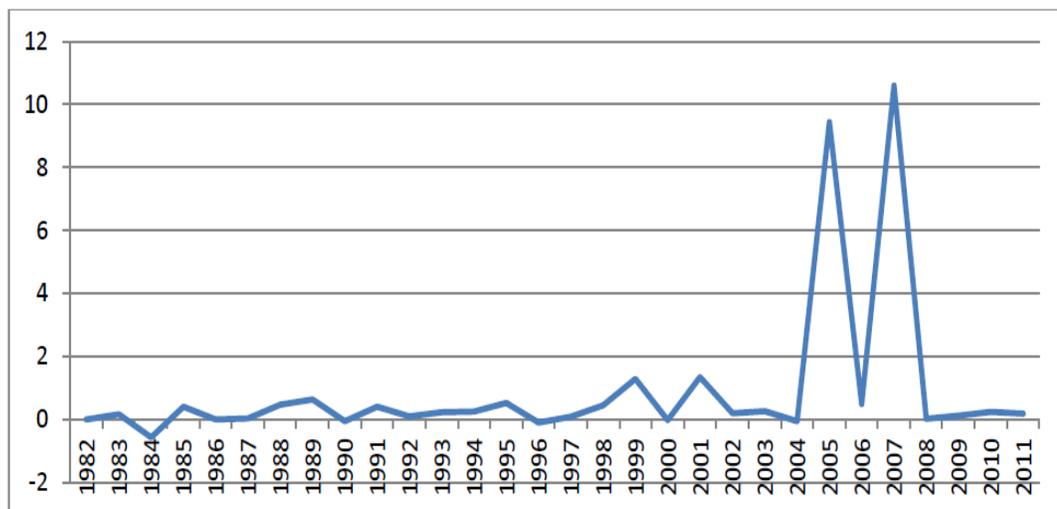
Karena keempat paket undang-undang tersebut juga mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maka revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terdapat keseragaman antara pengelolaan dana APBN dan APBD. (Nazier, 2006)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III tentang

pembagian urusan Pemerintah, juga di jelaskan bahwasannya Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud bahwa, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah yang telah di tetapkan Undang-Undang yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama.

Disebutkan dalam peraturan Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pembiayaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.(Muluk, 2005)

Gambar 1-1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 1981-2011 (%)



Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan gambar 1-1 di atas, yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Pati sejak tahun 1982 sampai dengan 2011 cenderung fluktuatif. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 1983 pertumbuhan mencapai 0,16%, dan ditahun berikutnya pada tahun 1984 pertumbuhan justru turun hingga mencapai - 0,57%, keadaan tersebut tidak lama, di empat tahun berikutnya tahun 1985-1989 meningkat sebesar 0,4 %. Kemudian di tahun 1990 sempat mengalami penurunan mencapai -0,05 %, dan kemudian terjadi kenaikan ditahun 1991 pertumbuhannya mencapai 0,4%, kenaikan tersebut berlangsung sampai tahun 1995 pertumbuhannya mencapai 0,53%. Pada tahun 1996 kembali mengalami penurun mencapai -0,1%. Pada masa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 tidak

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan PAD Kabupaten Pati yang mencapai 0,09 %, dan naik 0,45 %. Justru penurunan terjadi paska diberlakukannya undang-undang otonomi daerah pada tahun 2000 meskipun penurunan tersebut tidak terlalu besar hanya mencapai -0,02%. Pertumbuhan PAD Kabupaten Pati Pada tahun 2001-2003 pertumbuhannya meningkat hingga mencapai 1,34 %, 0,2 %, dan 0,26 %. Kemudian di tahun 2004 sempat mengalami penurunan lagi mencapai -0,05 %. Keadaan tersebut tidak lama di tahun berikutnya tahun 2005 meningkat cukup besar mencapai 9,44 %. Kemudian pada tahun 2006 pertumbuhannya turun kembali mencapai 0,49 %. Peningkatan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2007 hingga mencapai 10,59 %. Di tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang sedikit hanya mencapai 0,02 %. kenaikan realisasi tersebut terus terjadi sampai tahun 2010 mencapai 0,24 % dan pertumbuhan 0,19% pada tahun 2011.(DPPKAD Kabupaten Pati)

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah tidak terlepas dari permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Pati maka penulis tertarik untuk membuat skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 1990-2012”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang di tuangkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan di kemukakan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan krisis ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati tahun 1990-2012.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan krisis ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 1990-2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

3. Bagi pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.
4. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya Masyarakat Kabupaten Pati) mengetahui pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah Kabupaten Pati.

E. Metode Penelitian

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) dalam kurun waktu 1990-2012 yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pati.

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk Kabupaten Pati terhadap pendapatan asli daerah, penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Ghozali (2009) mengatakan Ordinary Least Square (OLS) adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependen.

secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LOGY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG X}_1 + \beta_2 \text{LOG X}_2 + \beta_3 \text{LOG X}_3 + \beta_4 \text{DUMMY} + U_t$$

Dimana :

$LOG Y$ = Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)

$LOG X_1$ = Pendapatan Domestik Regional Bruto (Jutaan Rupiah)

$LOG X_2$ = Jumlah Penduduk (Jiwa)

$LOG X_3$ = Pengeluaran Pemerintah Daerah (Ribuan Rupiah)

DUMMY = Krisis Ekonomi (Sebagai variabel dummy)

D = 0, sebelum krisis (Tahun 1990-1998)

D = 1, sesudah krisis (Tahun 1999-2012)

B_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

U_t = Variabel pengganggu

Selanjutnya penggunaan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) dapat dilakukan apabila asumsi regresi linier klasik terpenuhi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey – Reset)

Uji linieritas model dalam penelitian ini menggunakan uji *Ramsey Riset* yang dikenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau *general test of spesification error*.

2. Uji Normalitas Ut

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity Test*)

Masalah multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model.

b. Uji Heteroskedastisitas (*Heteroskedasticity Test*)

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi U_t tidak konstan atau berubah-ubah seiring dengan berubahnya nilai variabel independen (Gujarati, 1995)

c. Uji Otokorelasi (*Autocorrelation Test*)

Uji otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang.

4. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak.

5. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan eksis atau tidak.

6. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan prosentase total variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesa penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis PAD, hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis penelitian dan pembahasannya, pembuktian hipotesis serta interpretasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan serta kekurangan dan saran-saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN